



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DPMPTSP



-  Dpmpptsp Karangasem
-  dpmpptsp_kabkarangasem
-  <http://dpmpptsp.karangasemkab.go.id>
-  dpmpptsp karangasem
-  0363 23564

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan prasyarat bagi Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat diterapkan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pada masa RPJMD tahun 2021-2026 yang tentunya menggambarkan pencapaian kinerja selama masa RPJMD tersebut. Dengan berhasilnya disusun Laporan Kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas semua bantuan dan koordinasinya sehingga tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dapat berjalan dengan baik. Disamping itu kami menyadari bahwa dengan keterbatasan materi ini kami terbuka dengan menerima kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 9 Pebruari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



Ketut Mertadina
Ketut Mertadina, S.STP., MAP

Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum.....	2
1.3. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1 Perencanaan strategis perangkat daerah	5
2.2. Indikator kinerja utama.....	7
2.3. Perjanjian kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian kinerja organisasi.....	9
3.2. Realisasi keuangan.....	28
3.3. Capaian kinerja perangkat daerah terhadap capaian PK Bupati.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karangasem tahun 2022 merupakan gambaran tentang capaian kinerjanya selama tahun 2022 yang mengacu pada Penetapan Kinerja, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Karangasem. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 memuat asas-asas umum penyelenggara negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas serta akuntabilitas. Asas Akuntabilitas maksudnya adalah setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya yang menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan PD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan menggambarkan kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja. Komitmen untuk selalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan kinerja.

DPMPTSP Kabupaten Karangasem telah menetapkan visi, misi dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Capaian dari sasaran yang telah termuat dalam renstra sebagaimana berikut :

Uraian		Target	Realisasi	PK	IKU
Sasaran 1.	Meningkatnya realisasi investasi				
Indikator	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	216.424.761.684	√	√
Sasaran 2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal				
Indikator	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,65	86,47	√	√

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Karangasem yaitu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Data peluang investasi belum clean and clear yang mana belum bisa disusun potensi sesuai RDTR.
- 2) Dalam melakukan promosi tidak dilakukan dengan metode yang langsung mempertemukan dengan calon investor
- 3) Pemahaman pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.
- 4) Pelayanan kegiatan non usaha belum terakomodir di OSS RBA
- 5) Pelaksanaan *online single submission (OSS) RBA* belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- 6) Masih perlu pendampingan Pelaku Usaha terhadap Sistem OSS RBA
- 7) Perlunya adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional
- 8) Ketidaksesuaian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada.

Langkah kerja telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

- 1) Mendorong penyusunan peta potensi dan peluang usaha pada tahun 2023 sesuai dengan informasi RTRW
- 2) Melakukan promosi terintegrasi dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan propinsi
- 3) Mendorong pelaku usaha dengan cara melaksanakan monitoring terhadap penyampaian LKPM serta mengingatkan kewajiban pelaku usaha lainnya.
- 4) Mendorong penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insetif pada tahun 2023
- 1) Jumpa LKPM untuk pendampingan pelaporan LKPM dalam rangka meningkatkan pelaporan realisasi investasi
- 2) Layanan Bergerak untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- 3) Mengikuti Bimtek OSS, SiCantik Cloud, dan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur lainnya secara online dan offline
- 4) Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan yang berkelanjutan melalui media sosial
- 5) Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mereview Standar Operasional Prosedur serta berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 6) Adanya implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun)
- 7) Penggunaan sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat seperti penggunaan OSS RBA dan Si Cantik Cloud

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014. Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD dan APBN. Laporan kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh DPMPTSP Kabupaten Karangasem dalam jangka waktu tersebut yang merupakan bagian dari kontribusi Kabupaten Karangasem terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem dan pihak yang berkepentingan (stakeholder)
2. Memberikan umpan balik penyempurnaan berbagai kebijakan dalam peningkatan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Struktur organisasi DPMPTSP selanjutnya disajikan dalam gambar 1.1:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

1.2.3. KONDISI KEPEGAWAIAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kabupaten Karangasem didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur. Jumlah pegawai yang bekerja di DPMPTSP Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 sebanyak 21 orang yang terbagi dalam 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Gambaran kondisi pegawai tahun 2022 pada DPMPTSP Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Eselon

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	JP	Jumlah
1.	Kepala DPMPTSP	1					1
2.	Sekretariat	-	-	1	1	4	6
3.	Kelompok Jabatan Penanaman Modal	-	-	-	4	-	4
4.	Kelompok Jabatan PTSP	-	-	-	5	5	10
	Jumlah	1	-	1	10	9	21

Sumber : laporan kepegawaian semester II tahun 2022 DPMPTSP Kab. Karangasem

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1, pada jenjang eselon II menjalankan fungsi merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis serta pengendalian pencapaian sasaran, eselon III menjalankan fungsi koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran dan penetapan kinerja dinas serta pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas, pejabat fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Gambaran kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2022 sebagaimana tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	SMU	Jumlah
1.	Kepala DPMPTSP	1				1
2.	Sekretariat	1	4		1	6
3.	Kelompok Jabatan Penanaman Modal	1	3	-		4
4.	Kelompok Jabatan PTSP	3	5	1	1	10
	Jumlah	6	12	1	2	21

Sumber : laporan kepegawaian semester II tahun 2022 DPMPTSP Kab. Karangasem

Kondisi kepegawaian DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada sebagaimana tabel 1.2. tingkat pendidikan aparatur sipil DPMPTSP Kabupaten Karangasem yang paling

banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1 yang merupakan modal dasar serta salah satu syarat jabatan yang penting dalam pengembangan kinerja.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Secara umum menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan gambaran umum Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta perencanaan strategis (tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022) dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, realisasi kegiatan yang terkait Renstra, IKU, Penetapan Kinerja serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan serta upaya dalam menghadapi kendala ataupun hambatan yang dihadapi

Bab IV Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menyelaraskan perencanaan Perangkat Daerah dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Perencanaan strategis juga menjawab isu-isu strategis yang sedang berkembang dalam lingkup kewenangan organisasi tersebut. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan peluang, kekuatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.1. VISI DAN MISI

Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI(“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala menuju kehidupan karma dan gumi Karangasem sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, berdikasi secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Dengan konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnyan, Kertha, Santi dan Nadi) yaitu:

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kooperatif/ berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “metaksu” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera/ sukerta, sehat dan bahagia
- c. Karangasem sani adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah

Jadi Karangasem “PRAKERTI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/ Sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem metaksu. “PRAKERTI-NADI” juga akronim dari Pradnyan, Kerta, santi-Nyaman, aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari agung dan kahyangan jagat.

Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra DPMPTSP terdapat pada:

- 1) Misi 3, yaitu Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konprehensif dan terintegrasi.

Tujuan dari misi tersebut yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem. Dengan sasaran meningkatnya Investasi yang di Kabupaten Karangasem

- 2) Misi 6, yaitu Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima

Tujuan dari misi tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Karangasem 2021–2026 mengemban misi 3 dan misi 6. Berikut disampaikan keterkaitan tujuan dan sasaran DPMPTSP dengan RPJMD

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran

KABUPATEN KARANGASEM		DPMPTSP	
Dukungan terhadap Visi Kepala Daerah	Dukungan Misi Kepala Daerah	Dukungan Tujuan	Sasaran Strategis
<i>Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi ("Karangasem Prakerti Nadi")</i>	Misi 3 : Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konprehensif dan terintegrasi	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatkan realisasi investasi
	Misi 6 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Sumber : Renstra PD 2021-2026

Tujuan 1. Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-3 yaitu Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konprehensif dan terintegrasi. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dengan strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui meningkatkan realisasi investasi yang diharapkan dapat memberikan multiplayer effect dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan 2 Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-6 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat membentuk birokrasi pemerintah yang prima dan responsif ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penanaman modal.

Tabel 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatkan realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	204.601.000.000	206.647.000.000	208.714.000.000	210.801.000.000
2.	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,60	84,65	84,70	84,75	84,80

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja, penyusunan dokumen penetapan kinerja, dan menyusun laporan kinerja. IKU menggambarkan target pencapaian indikator OPD sesuai core business OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi. IKU DPMPTSP Kabupaten Karangasem disajikan pada tabel 2.3. dibawah :

Tabel 2.3
IKU DPMPSTP Kabupaten Karangasem

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	204.601.000.000	206.647.000.000	208.714.000.000	210.801.000.000
2.	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,60	84,65	84,70	84,75	84,80

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja DPMPSTP Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dimana didalamnya diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya jumlah investasi di Kab. Karangasem	Jumlah realisasi investasi	202.575.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	44.600.312
				Program Promosi Penanaman Modal	99.150.235
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	426.899.599
2	Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,60	Program Pelayanan Penanaman Modal	449.200.505
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	28.248.612

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi wewenang untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (assessment) kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi atas output yang dihasilkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2022. Rincian tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 dapat disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Sasaran Tahun 2022

Uraian		Target	Realisasi	PK	IKU
Sasaran 1.	Meningkatnya realisasi investasi				
Indikator	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	216.424.761.684	√	√
Sasaran 2	Meningkat kan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal				
Indikator	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,65	86,47	√	√

3.1.1 ANALISA CAPAIAN SASARAN

Adapun penjelasan dari capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan	: Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi
Sasaran 1	: Meningkatkan realisasi investasi

Uraian Sasaran : indikator yang digunakan untuk menghitung tercapainya sasaran ini yaitu jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa banyak jumlah investasi yang telah dipergunakan di Kabupaten Karangasem. Pencapaian terhadap sasaran ini serta pengukurannya secara rinci disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran I Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	200.570.000.000	216.424.761.684	106,84%

Realisasi investasi tahun 2022 sejumlah 216.424.761.684 bersumber dari PMDN sejumlah 161.462.819.981 dan PMA sejumlah 54.961.941.703 atau 106,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar 200.570.000.000 sementara realisasi PMA tahun 2021 sejumlah US\$ 8.384.659,15 sedangkan realisasi PMDN pada tahun 2021 sebesar Rp. 78.044.700.000. Peningkatan investasi dari tahun 2021 sebesar 12,71% dimana sebelumnya mengalami penurunan -3,31%. Hal ini mengindikasikan kepercayaan investor luar negeri terhadap iklim investasi di Kabupaten Karangasem yang semakin baik.

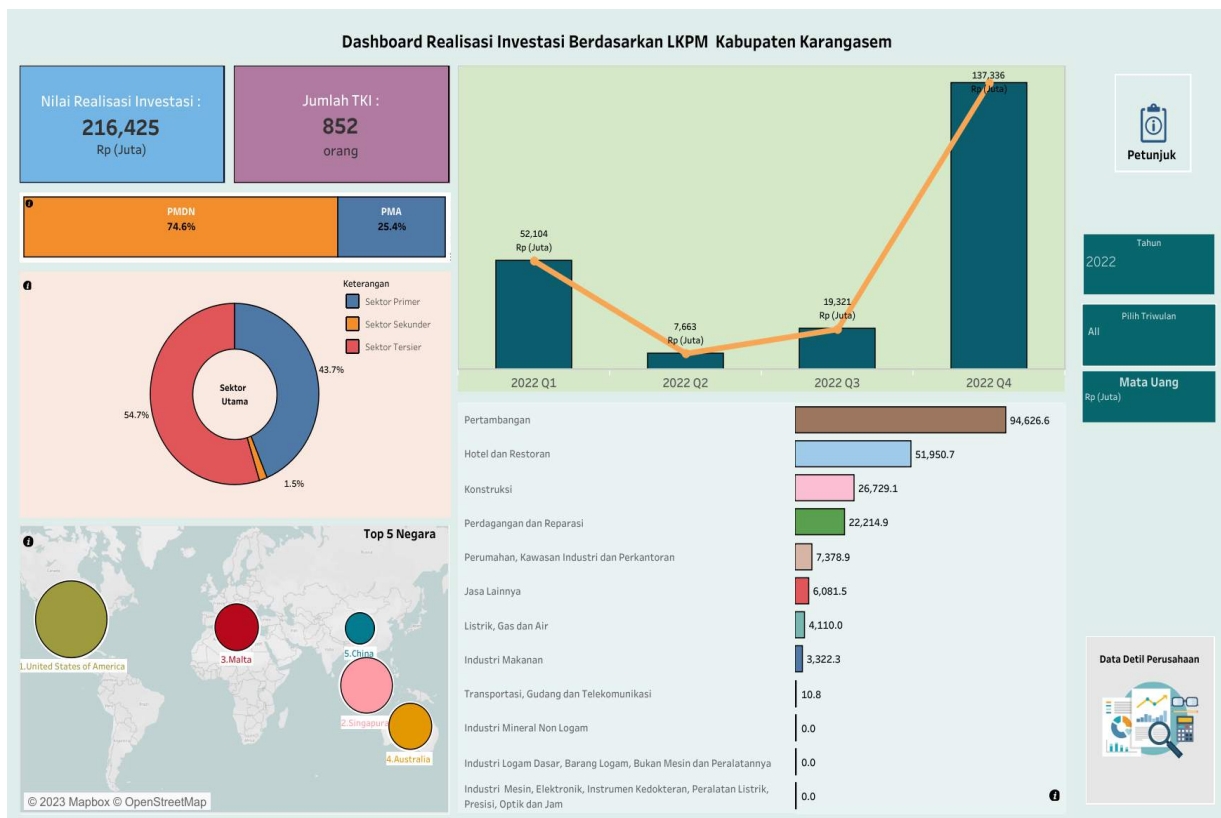
Realisasi Penanaman Modal adalah pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh perusahaan PMA dan PMDN dalam bentuk kegiatan nyata. Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2022 melalui vaksin covid-19 mulai meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk memulai usaha.

Tabel 3.3.
Realisasi Investasi 2021-2022

Tahun	PMDN	PMA	Peningkatan
2021	82,42	-58,82	-3,31
2022	13,41	10,72	12,71

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 12,71 sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2021 -3,31. Dal hal ini keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha, ditopang pula dengan meningkatnya konsumsi masyarakat ditandai dengan pulihnya mobilitas masyarakat. Infografis capaian realisasi investasi di Kabupaten Karangasem sebagaimana berikut :

Gambar 2.1
Infografis Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem Tahun 2022

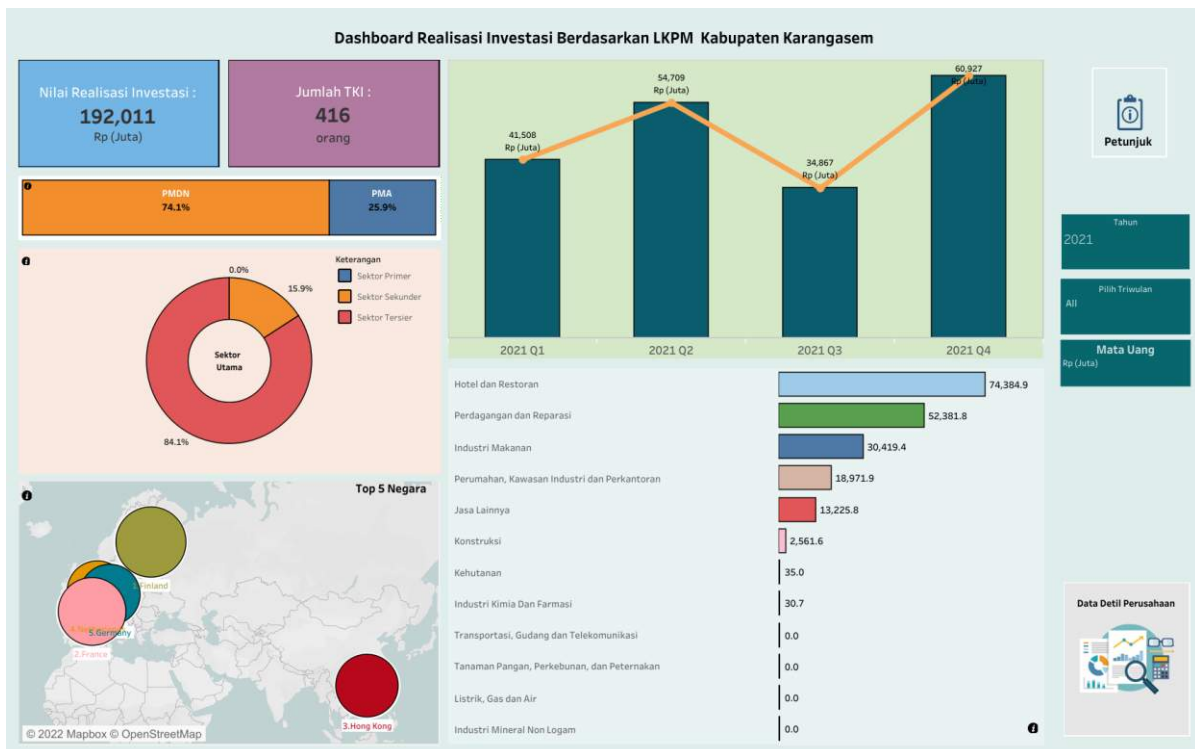


Sumber : NSWi (dasbord Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem) tahun 2022

Tahun 2022 komposisi PMDN dan PMA terhadap realisasi investasi masing-masing 74,6% dan 25,4% dengan sebaran sektor tersier 54,7%, sektor primer 43,7%, dan sektor sekunder 1,5%. Tingkat pertumbuhan investasi sebesar 12,71 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar -3,31. Arus investasi asing berasal dari negara USA, Singapura, Malta, Australia, dan China. Lonjakan tertinggi realisasi investasi terjadi pada triwulan IV hal ini sejalan dengan mulai normalnya aktivitas masyarakat juga berimbang terhadap normalnya arus investasi. Sektor pertambangan menempati sektor tertinggi pada tahun 2022 sebesar 94,626 sektor ini menggeser sektor hotel dan restoran yang pada tahun 2021 menempati sektor tertinggi, hal ini berarti Kabupaten Karangasem terhadap Mineral Bukan Logam masih memiliki potensi unggulan. Jumlah tenaga kerja yang terserap 852 orang atau 5,57 dari 153 PMA/PMDN.

Dibandingkan dengan tahun 2021 daya serap tenaga kerja meningkat 3,78 hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi investasi juga menyerap tenaga kerja.

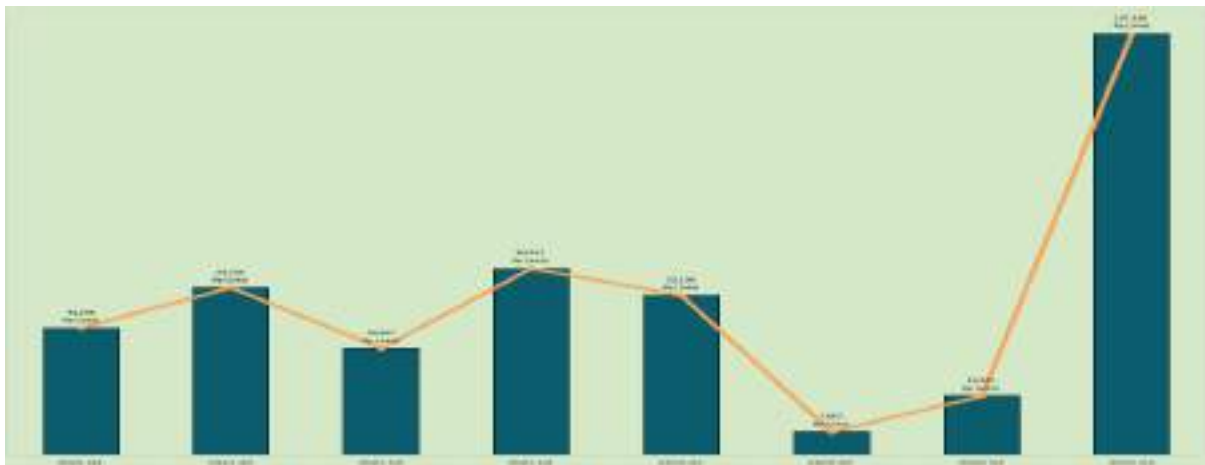
Gambar 2.2
Infografis Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem Tahun 2021



Sumber : NSWi (dasbord Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem) tahun 2021

Dari infografis pada tahun 2021 diatas terlihat bahwa komposisi PMA dan PMDN terhadap realisasi investasi di Kabupaten Karangasem masing-masing sebesar 25,9% PMA dan 74,1% PMDN dengan sebaran 83,6% pada sektor tersier dan 84,1% pada sektor sekunder 15,9% pada sektor sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier dalam hal ini hotel dan restoran masih menempati sektor tertinggi dalam realisasi investasi. Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun 2021 sebanyak 416 orang atau sebanyak 1,79% dari 233 PMA dan PMDN pada tahun 2021. Sampai akhir triwulan keempat investasi tertinggi terjadi pada triwulan ke-4 ini tidak terlepas dengan telah normalnya kembali aktivitas masyarakat pada saat PPKM mulai dilonggarkan, tren turun terjadi pada triwulan 3 karena PPKM mulai kembali diberlakukan sebagai akibat meningkatnya covid-19.

Gambar 2.3
Infografis Perbandingan Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2022



Sumber : NSWi (dasbord Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem) tahun 2021-2022

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pergerakan investasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022 periode triwulan 4, paling rendah pada periode triwulan 2 pada tahun 2022. Optimisme ekonomi tahun 2022 ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut serta makin maraknya peranan internet dalam pengembangan ekonomi kreatif dan strategi pemasaran produk sehingga tidak terbatas ruang dan waktu.

Realisasi PMA tahun 2020 sejumlah US\$ 8.384.659,15, realisasi PMA tahun 2019 sejumlah US\$ 1.780.006 sementara realisasi PMA tahun 2018 sejumlah US\$ 259.971.181 sedangkan pada tahun 2021 realisasi PMA sejumlah US\$ 6.075.853 atau sebesar 127,77% dari target. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar US \$ 4.984.759,15 atau turun sebesar 59,45% yang pada tahun 2020 juga turun sebesar 30,50% dari tahun 2019

Pada tahun 2021 realisasi PMDN Rp. 142.372.500.000 atau sebesar 60,14% dari target, pada tahun sebelumnya realisasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp. 78.044.700.000, realisasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp. 200.965.030.089 realisasi PMDN pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.367.220.929.711. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 64.327.800.000 atau sebesar 82,42% dimana sebelumnya pada tahun 2020 turun sebesar 41,05% dari tahun 2019. Berikut disampaikan dukungan program terhadap pencapaian sasaran I :

Tabel 3.3.
Pengukuran Pencapaian Sasaran I

No.	Sasaran/Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	216.424.761.684	106,84%	Jumlah realisasi PMDN dan PMA
1.1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	5 %	-34,33%	-686,6%	
1.1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6 jenis	5 jenis	83,33 %	
1.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	5 jenis	5 jenis	100%	

No.	Sasaran/Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.1.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	0	0	0	Ditiadakan diperubahkan karena : tujuan sub kegiatan ini telah terakomodir dalam sub kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
1.1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	8 kecamatan	2 kecamatan	25%	Fokus penyusunan profil pada keunggulan potensi kapas
1.1.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	25 buku	25 buku	100%	
1.2.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	50 %	96,01%	192,02%	
1.2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	656 minat	5585 minat	851,37 %	
1.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	1 kali	1 kali	100%	Dalam bentuk pameran APKASI tanggal : 19 s.d 23 Juli 2022
1.3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	5 %	24,24 %	484,80%	
1.3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	50 pelaku usaha	311 pelaku usaha	622%	Melebihi target karena adanya dukungan BKPM RI dalam bentuk DAK Fasilitasi Penanaman Modal
1.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	15 buku	15 buku	100%	
1.3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	280 orang	293 orang	104,64%	

No.	Sasaran/Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	7 kali	5 kali/16 pelaku usaha	71,43 %	Dari target DAK terpenuhi

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki capaian terendah, kondisi ini di hitung berdasarkan peningkatan proyek realisasi investasi, sebelumnya tahun 2021 jumlah proyek sebanyak 233 sedangkan pada tahun 2022 menurun sebanyak 153. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun realisasi meningkat akan tetapi tidak sejalan dengan jumlah proyek/jumlah PMA/PMDN mengalami penurunan atau secara kuantitas mengalami penurunan jumlah proyek akan tetapi secara kualitas adanya peningkatan realisasi investasi. Data realisasi investasi ini disampaikan berdasarkan LKPM yang dibuat oleh pelaku usaha sehingga sangat tergantung kepada kepatuhan para pelaku usaha PMA maupun PMDN dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya.

Kondisi ini dikarenakan yaitu informasi potensi/peleluang investasi di Kabupaten Karangasem yang sesuai RTRW belum memenuhi kebutuhan informasi pelaku usaha (*investor needs*). Penyampaian informasi masih dilakukan dalam bentuk penyusunan profil penanaman modal dengan mengangkat sektor pertanian kapas pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu. Disisi lain kebijakan daerah untuk mendorong investasi belum terlihat jelas sehingga belum menciptakan iklim investasi yang mampu menarik investasi.

Adanya pandemi covid juga mempengaruhi stabilitas investasi dimana dengan adanya pembatasan aktivitas pelaku usaha berdampak dan aktivitas normal kembali pada pertengahan 2022. Kendala lainnya yaitu belum maksimalnya pelaksanaan promosi penanaman modal dimana promosi yang selama dilaksanakan melalui pameran investasi. Kondisi lainnya dimana sektor pertambangan yang merupakan salah satu potensi Kabupaten Karangasem fasilitasi perizinannya sesuai kewenangan ada di Propinsi Bali hal ini tentunya memungkinkan adanya hambatan komunikasi mengenai syarat dan prosedur rencana investasi di sektor pertambangan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut telah dilaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemantauan penanaman modal diarahkan pada pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha. Selain pemantauan juga dilaksanakan JUMPA LKPM dengan maksud untuk mendorong dan mengumpulkan LKPM dari Pelaku Usaha.

Pembinaan penanaman modal diarahkan pada pembinaan melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pelaku usaha, penyampaian LKPM secara online dan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko.

Pengawasan penanaman modal diarahkan pada upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.

Adapun kewajiban pelaku usaha sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
3. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
5. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan

Tabel 3.4.
Capaian Sasaran Terhadap Target Akhir Renstra OPD 2022-2026

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi pada tahun 2022	Capaian
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	210.801.000.000	216.424.761.684	102,67%

Target pada akhir Renstra merupakan target yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2026 merupakan realisasi PMD dan PMA pada tahun berkenaan. Realisasi investasi tahun 2022 sebesar 216.424.761.684 atau 102,67% dari target investasi akhir Renstra

Berikut disampaikan tingkat efisiensi dalam pencapaian yang mendukung sasaran ini.

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran
Tahun 2022

No.	Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=6/7	9=(5-8)/8
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-34,33%	75,48%	-45,48%	100%	100%	100%	-145,48%
1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	83,33%	75,48%	110,40%	100%	100%	100%	10,40%
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	75,48%	132,49%	100%	100%	100%	32,49%
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	25%	72,26%	34,60%	100%	100%	100%	-65,40%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	100%	72,26%	138,39%	100%	100%	100%	38,39%
II	Program Promosi Penanaman Modal	192,02%	94,15%	203,95%	100%	100%	100%	103,95%
3	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	851,37%	94,15%	904,27%	100%	100%	100%	804,27%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,15%	106,21%	100%	100%	100%	6,21%
III	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	484,80%	80,78%	600,15%	100%	100%	100%	500,15%
1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	622%	80,78%	769,99%	100%	100%	100%	669,99%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	92,36%	108,27%	100%	100%	100%	8,27%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	104,64%	82,01%	127,59%	100%	100%	100%	27,59%

No.	Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=6/7	9=(5-8)/8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	71,43%	19,00%	375,95%	100%	100%	100%	275,95%

Tingkat efisiensi yang paling tinggi pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana pelaksanaan kegiatannya sebagai media untuk menginformasikan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Karangasem. Tingkat efisiensi tinggi juga merupakan sumbangan dari atensi pemohon penanaman modal yang secara mandiri memanfaatkan OSS-RBA untuk memohon perijinan. Tingkat efisiensi terendah terdapat pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota hal ini karena adanya perubahan strategi dimana informasi yang disampaikan dalam bentuk profil investasi dengan mengangkat potensi kapas di dua kecamatan yaitu kubu dan abang. Adapun capaian penggunaan dana alokasi khusus fasilitasi penanaman modal sebagaimana berikut :

Tabel 3.6.
Dukungan DAK-Fasilitasi Penanaman Modal

No.	Uraian Sub Kegiatan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			368.526.500	302.238.800	82,01%
	- Bimtek implementasi pengawasan perijinan berusaha	7 kali @40 peserta	280 peserta			
	- Bimtek implementasi perijinan berusaha	4 kali @ 40 peserta	160 peserta			
	- Identifikasi permasalahan	1 kali @ 10 peserta	10 peserta			
	- Penyelesaian permasalahan dan hambatan	1 kali @ 10 peserta	10 peserta			
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 kali @ 2 peserta	16 peserta	15.387.500	2.923.200	19%

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu

- 1) Data peluang investasi belum clean and clear yang mana belum bisa disusun potensi sesuai RDTR.
- 2) Dalam melakukan promosi tidak dilakukan dengan metode yang langsung mempertemukan dengan calon investor
- 3) Pemahaman pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.

Beberapa langkah kerja telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

- 1) Mendorong penyusunan peta potensi dan peluang usaha pada tahun 2023 sesuai dengan informasi RTRW
- 2) Melakukan promosi terintegrasi dengan DPMPSTSP kabupaten/kota dan propinsi
- 3) Mendorong pelaku usaha dengan cara melaksanakan monitoring terhadap penyampaian LKPM serta mengingatkan kewajiban pelaku usaha lainnya.
- 4) Mendorong penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif pada tahun 2023
- 5) Jumpa LKPM untuk pendampingan pelaporan LKPM dalam rangka meningkatkan pelaporan realisasi investasi

Tujuan : Peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Uraian Sasaran : indikator yang digunakan untuk menghitung tercapainya sasaran ini yaitu nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPSTSP. Pencapaian terhadap sasaran ini serta pengukurannya secara rinci disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Pengukuran Pencapaian Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	nilai	84,65	86,47	102,15%	
2.1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	persen	96	100	104,17%	
2.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	persen	96	100	104,17%	
2.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	persen	96	100	104,17%	
		Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	persen	96	100	104,17%	
		Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	persen	96	100	104,17%	
		Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	persen	96	100	104,17%	
2.1.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	persen	96	100	104,17%	
		Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	persen	96	100	104,17%	
2.1.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya pengaduan yang ditangani	pengaduan	2	2	100,00%	
		Banyaknya buku SKM yang dicetak	buku	40	40	100,00%	
2.1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	kali	16	16	100,00%	
2.2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	persen	75	80,95	170,31%	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2.2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	persen	90	100	111,11%	
2.2.2.1	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perizinan dan non perizinan	orang	250	281	112,40%	
2.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	persen	100	100	100%	
2.2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	persen	100	100	100%	
2.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	buku	6	6	100%	
2.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	buku	20	13	65 %	
2.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	buku	20	16	80 %	
2.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	buku	9	9	100 %	
2.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	persen	100	100	100%	
2.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	100%	
2.2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	dokumen	500	844	168,80%	
2.2.3	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	persen	100	100	100%	
2.2.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	unit	588	564	95,92%	
2.2.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	bulan	12	12	100%	
2.2.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	buku	150	108	72,00%	
		Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	lembar	14.220	11.745	82,59%	
2.2.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	eks	1800	1.125	62,50%	
2.2.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	kali	68	52	76,47%	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2.2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100%	
2.2.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	unit	12	12	100%	
2.2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100%	
2.2.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	surat	1600	3.001	187,56%	
2.2.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	rekening	11	11	100%	
2.2.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	unit	476	472	99,16%	
2.2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100%	
2.2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	unit	11	11	100	
2.2.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	24	38	158,33%	
2.2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	unit	1	1	100%	

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dibidang perizinan DPMPTSP Kabupaten Karangasem berupaya memberikan kemudahan bagi pengusaha dan memperpendek jalur birokrasi perizinan dimana proses perizinan dapat diselesaikan pada satu tempat dari mulai pendaftaran sampai pada pengeluaran izin sehingga akan dapat mempersingkat waktu penyelesaian perizinan. Beberapa bentuk layanan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Mall Pelayanan Publik

Dasar hukum penyelenggaraan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem telah diresmikan tanggal 22 Juni 2018 oleh Menteri PAN & RB Republik Indonesia. MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Adapun tujuan Mall Pelayanan Publik :

- 1) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- 2) Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Capaian pelayanan pada Mall Pelayanan Publik selama tahun 2019-2020 jumlah layanan yang telah dilakukan melalui MPP pada Tahun 2019 sebanyak 104.911 sedangkan tahun 2020 sebanyak 70.731 layanan. Pada tahun 2021 sebanyak 35.278 layanan, sementara tahun 2022 sebanyak 14.246 layanan.

2. Penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*)

Penerapan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Capaian pelayanan melalui OSS yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah terbit melalui OSS pada tahun 2019 sebanyak 836 buah sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 436 buah.

Izin yang telah diterbitkan melalui OSS sebanyak 307 izin selama tahun 2020 dari izin yang diakomodir melalui OSS meliputi 35 jenis izin. Pada tahun 2021 sebanyak 1.025 izin dari 1.041 ijin yang dimohonkan melalui OSS. Pada tahun 2022 sebanyak 4.547 ijin

Pada pertengahan tahun 2021 pemerintah meluncurkan prosedur perizinan berusaha berbasis resiko dengan menggunakan platform *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Cipta Kerja.

Tujuan dari OSS-RBA adalah menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dimana izin usaha akan dikeluarkan melalui pendekatan risiko. Pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya. Sebagai contoh, kegiatan usaha berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan NIB sekaligus izin usaha.

3. SiCantik Cloud

Penggunaan aplikasi SiCantik Cloud untuk memberi dukungan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak diakomodir dalam OSS. Sampai tahun 2020 perizinan dan non perizinan yang telah diakomodir oleh SiCantik Cloud 14 jenis izin. Tahun 2022 yang terakomodir SiCantik Cloud sebanyak 37 jenis ijin

Tabel 3.8.
Capaian Sasaran 2 Tahun 2020-2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	86	84,51	98,27%	88	78,77	89,51%	84,65	86,47	102,15 %

Pengukuran IKM dimaksudkan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi pengelolaan pengaduan dan penyampaian informasi perizinan secara berkelanjutan dengan menyiapkan media komunikasi berupa website, media social facebook, dan leafleat sebagai sarana pendukung serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui OSS dan Si Cantik Cloud dan pelayanan di satu tempat yaitu MPP. Berikut nilai IKM pada semester I dan II.

Tabel 3.9.
Nilai SKM

Tahun	Nilai SKM Semester I	Nilai SKM Semester II
2018	78,95	79,04
2019	83,88	85,36
2021	82,75	84,51
2022	80,395	86,47

Sumber : Buku IKM DPMPTSP Kab. Karangasem

Adapun IKM yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di dalamnya terdapat 9 unsur penting yang mencakup berbagai sektor layanan yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem selaku salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dibandingkan dengan semester I nilai IKM pada semester II mengalami peningkatan sebanyak 6,075. Beberapa faktor penyebabnya sebagaimana berikut :

- 1) Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mereview Standar Operasional Prosedur serta berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- 2) Adanya implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun)
- 3) Memaksimalkan media sosial untuk penyebaran informasi
- 4) Penggunaan sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat seperti penggunaan OSS RBA dan Si Cantik Cloud
- 5) Adanya layanan bergerak untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Tabel 3.10.
Jumlah Pengaduan

Tahun	Banyaknya Pengaduan	Pengaduan Yang ditindaklanjuti
2022	2 pengaduan	2 pengaduan
2021	27 pengaduan	27 pengaduan
2019	20 pengaduan	20 pengaduan
2018	9 pengaduan	9 pengaduan

Dari pengaduan yang diterima sebanyak 2(dua) pengaduan telah ditindak lanjuti sebanyak 2(dua) pengaduan

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Terhadap target Renstra OPD 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi tahun 2022	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,80	86,47	101,97%

Target akhir periode renstra merupakan target yang diharapkan dapat dicapai pada akhir periode renstra dimana target yang dihitung pada akhir renstra bukan target kumulatif sehingga capaian akhir renstra akan terukur pada akhir tahun periode renstra.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- 1) Pelayanan kegiatan non usaha belum terakomodir di OSS RBA
- 2) Pelaksanaan *online single submission (OSS) RBA* belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan.

- 3) Masih perlu pendampingan Pelaku Usaha terhadap Sistem OSS RBA
- 4) Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum optimal.
- 5) Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang kompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6) Perlunya adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional
- 7) Ketidaksesuaian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada.
- 8) Perlunya adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional

Langkah - langkah yang dilakukan untuk mendorong perbaikan capaian dalam sasaran ini yaitu :

- 1) Menggunakan SiCantik Cloud
- 2) Layanan Bergerak untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- 3) Mengikuti Bimtek OSS, SiCantik Cloud, dan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur lainnya secara online dan offline
- 4) Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan yang berkelanjutan melalui media sosial

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran
Tahun 2022

No.	Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=6/7	9=(5-8)/8
I	Program Pelayanan Penanaman Modal	104,17%	89,96%	115,80%	100,00%	100,00%	100,00%	15,80%
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	104,17%	89,96%	115,80%	100,00%	100,00%	100,00%	15,80%

No.	Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=6/7	9=(5-8)/8
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	104,17%	97,65%	106,68%	100,00%	100,00%	100,00%	6,68%
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	104,17%	95,94%	108,58%	100,00%	100,00%	100,00%	8,58%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100,00%	91,33%	109,50%	100,00%	100,00%	100,00%	9,50%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100,00%	95,51%	104,70%	100,00%	100,00%	100,00%	4,70%
II	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	107,93%	99,93%	108,01%	100,00%	100,00%	100,00%	8,01%
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	111,11%	99,93%	111,19%	100,00%	100,00%	100,00%	11,19%
	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	112,40%	99,93%	112,48%	100,00%	100,00%	100,00%	12,48%
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	84,55%	118,27%	100,00%	100,00%	100,00%	18,27%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	99,75%	100,25%	100,00%	100,00%	100,00%	0,25%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	99,92%	100,08%	100,00%	100,00%	100,00%	0,08%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	65,00%	94,03%	69,13%	100,00%	100,00%	100,00%	-30,87%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	80,00%	99,14%	80,69%	100,00%	100,00%	100,00%	-19,31%

Laporan Kinerja Tahun 2022

No.	Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=6/7	9=(5-8)/8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	99,81%	100,19%	100,00%	100,00%	100,00%	0,19%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	90,71%	110,24%	100,00%	100,00%	100,00%	10,24%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%	93,08%	107,43%	100,00%	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	168,80%	99,06%	170,40%	100,00%	100,00%	100,00%	70,40%
3	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100,00%	76,56%	130,62%	100,00%	100,00%	100,00%	30,62%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95,92%	97,04%	98,85%	100,00%	100,00%	100,00%	-1,15%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00%	78,75%	126,98%	100,00%	100,00%	100,00%	26,98%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77,30%	61,03%	126,66%	100,00%	100,00%	100,00%	26,66%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62,50%	60,58%	103,17%	100,00%	100,00%	100,00%	3,17%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,47%	74,14%	103,14%	100,00%	100,00%	100,00%	3,14%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	98,54%	101,48%	100,00%	100,00%	100,00%	1,48%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	98,54%	101,48%	100,00%	100,00%	100,00%	1,48%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	77,94%	128,30%	100,00%	100,00%	100,00%	28,30%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187,56%	99,92%	187,71%	100,00%	100,00%	100,00%	87,71%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	73,42%	136,20%	100,00%	100,00%	100,00%	36,20%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,16%	91,59%	108,27%	100,00%	100,00%	100,00%	8,27%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	76,01%	131,56%	100,00%	100,00%	100,00%	31,56%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	80,15%	124,77%	100,00%	100,00%	100,00%	24,77%

No.	Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=6/7	9=(5-8)/8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158,33%	93,84%	168,72%	100,00%	100,00%	100,00%	68,72%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	74,55%	134,14%	100,00%	100,00%	100,00%	34,14%

Tingkat efisiensi tertinggi dan terendah terdapat dikegiatan pada Program Pelayanan Bidang Perizinan hal ini tergantung pada izin yang diterbitkan, penerbitan dan pendaftaran izin yang semula manual telah dilakukan melalui manual dan online. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu ketaatan pemohon dalam melengkapi persyaratan permohonan setelah verifikasi.

3.2. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut di atas ditunjang dengan anggaran sebesar 6.140.616.423 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem dan DAK Non Fasilitas Penanaman Modal dengan realisasi belanja sebesar Rp. 5.299.968.546 (86,31%). Rincian anggaran tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran pada DPMPSTSP Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran DPMPSTSP Tahun 2022

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian	Ket.
Meningkatnya realisasi investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.955.212	29.403.025	75,48%	
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	38.955.212	29.403.025	75,48%	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			#DIV/0!	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5.645.100	4.079.000	72,26%	

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian	Ket.
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	5.645.100	4.079.000	72,26%	
	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.150.235	93.346.828	94,15%	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	99.150.235	93.346.828	94,15%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	426.899.599	344.861.900	80,78%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	42.985.599	39.699.900	92,36%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	368.526.500	302.238.800	82,01%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.387.500	2.923.200	19,00%	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	449.200.505	430.571.275	95,85%	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	246.344.020	240.558.725	97,65%	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	108.237.048	103.840.250	95,94%	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	26.157.162	20.785.550	79,46%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	68.462.275	65.386.750	95,51%	
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	28.248.612	28.229.900	99,93%	

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian	Ket.
		Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	28.248.612	28.229.900	99,93%	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.996.049	35.905.250	99,75%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.090.749	34.062.375	99,92%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	926.000	870.700	94,03%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	786.700	779.950	99,14%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	192.600	192.225	99,81%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.600.320.882	2.358.760.706	90,71%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.563.376.433	2.386.096.913	93,08%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.944.449	36.595.725	99,06%	
		Administrasi umum perangkat daerah	433.760.725	332.078.815	76,56%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.022.900	19.430.100	97,04%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.154.525	147.384.900	78,75%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.937.500	6.064.625	61,03%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	7.875.000	60,58%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.645.800	150.975.440	74,14%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.678.000	144.530.000	98,54%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.678.000	144.530.000	98,54%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.504.160	355.792.546	77,94%	

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian	Ket.
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.496.836	49.455.400	99,92%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.738.500	268.540.996	73,42%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.268.824	37.796.150	91,59%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.419.257.344	1.078.826.119	76,01%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.848.060	187.421.000	80,15%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	37.535.000	93,84%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.145.409.284	853.870.119	74,55%	
		Jumlah	6.140.616.423	5.299.968.546	86,31%	

Sumber : RFK DPMPTSP bulan Desember Tahun 2022

3.3. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP CAPAIAN PK BUPATI

Sesuai dengan arah kebijakan DPM-PTSP Kabupaten Karangasem Periode 2021-2026, mengemban misi 3 yaitu Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk industri terutama agro industri serta memperbaiki iklim perdagangan. Adapun capaian terhadap PK Bupati sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2021-2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Capaian	Target	Capaian
12	Penanaman Modal						
12.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	203	205	233	207	153
12.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	198.584.220.000	200.570.062.200	192.011.049.006	200.570.000.000	216.424.761.684
12.03	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3,74	3,78	1,79	3,82	5,57

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Capaian	Target	Capaian
12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen tase (%)	-12,1	1	-3,31	1	12,71

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan seperti tabel diatas dimana ada pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada realisasi investasi, daya serap tenaga kerja akan tetapi terjadi penurunan pada jumlah investor.

BAB IV PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 telah memuat asas-asas umum penyelenggara negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas serta akuntabilitas. Asas Akuntabilitas maksudnya adalah setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun sejumlah program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih ada sejumlah hambatan/kendala yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem diantaranya :

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- 1) Data peluang investasi belum clean and clear yang mana belum bisa disusun potensi sesuai RDTR.
- 2) Dalam melakukan promosi tidak dilakukan dengan metode yang langsung mempertemukan dengan calon investor
- 3) Pemahaman pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.
- 4) Pelayanan kegiatan non usaha belum terakomodir di OSS RBA
- 5) Pelaksanaan *online single submission (OSS) RBA* belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- 6) Masih perlu pendampingan Pelaku Usaha terhadap Sistem OSS RBA
- 7) Perlunya adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional
- 8) Ketidaksesuaian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada.

Langkah kerja telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

- 1) Mendorong penyusunan peta potensi dan peluang usaha pada tahun 2023 sesuai dengan informasi RTRW
- 2) Melakukan promosi terintegrasi dengan DPMPSTSP kabupaten/kota dan propinsi
- 3) Mendorong pelaku usaha dengan cara melaksanakan monitoring terhadap penyampaian LKPM serta mengingatkan kewajiban pelaku usaha lainnya.
- 4) Mendorong penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif pada tahun 2023
- 5) Jumpa LKPM untuk pendampingan pelaporan LKPM dalam rangka meningkatkan pelaporan realisasi investasi
- 6) Layanan Bergerak untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- 7) Mengikuti Bimtek OSS, SiCantik Cloud, dan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur lainnya secara online dan offline
- 8) Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan yang berkelanjutan melalui media sosial
- 9) Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mereview Standar Operasional Prosedur serta berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 10) Adanya implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun)
- 11) Penggunaan sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat seperti penggunaan OSS RBA dan Si Cantik Cloud

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amlapura, 9 Pebruari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19770510 199601 1 001



LAMPIRAN



-  Dpmpstsp Karangasem
-  dpmpstsp_kabkarangasem
-  <http://dpmpstsp.karangasemkab.go.id>
-  dpmpstsp karangasem
-  0363 23564

PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2022

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi Indikator : - Jumlah realisasi investasi	202,575,000,000	216,424,761,683	106.84%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal Indikator : - Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84.6	86.47	102.21%

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatkan realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	216.424.761.683	106,84%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,6	86,47	102,21%

RENCANA AKSI SASARAN

TAHUN 2022

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Sasaran 1 :Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	5	persen		44.600.312					Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6	jenis		38.955.212					
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	5	jenis		38.955.212	√	√	√	√	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	0	kali	fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha	-		√		√	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	8	kecamatan		5.645.100					
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	25	buku	Penyusunan profil investasi unggulan daerah	5.645.100			√	√	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	50	persen		99.150.235					Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	656	minat		99.150.235					

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	1	kali	Penyelenggaraan pameran investasi seperti APKASI	99.150.235		√			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	5	persen		426.899.599					Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	50	pelaku usaha		426.899.599		√			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	15	buku	Monitoring pelaku usaha untuk pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi LKPM	42.985.599	√	√	√	√	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	280	orang	Memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal	368.526.500	√	√	√	√	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	7	kali	Memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal	15.387.500	√	√	√	√	

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya pengaduan yang ditangani	2	pengaduan	Penyediaan layanan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	26.157.162	√	√	√	√	
			Banyaknya buku SKM yang dicetak	40	buku							
		Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	16	kali	Pelayanan perizinan dan non perizinan jemput bola	68.462.275	√	√	√		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	75	persen		28.248.612					Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	90	persen		28.248.612					
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	250	orang	Penyampaian informasi, penyajian dan pemanfaatan data	28.248.612	√	√	√	√	
Sasaran 2 :Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	persen		5.092.517.160					Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	persen		35.996.049					
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	6	buku	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	34.090.749		√	√		

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	20	buku	Penyusunan dokumen anggaran perangkat daerah	926.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	20	buku	Penyusunan dokumen anggaran perubahan perangkat daerah	786.700			√	√	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9	buku	Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	192.600			√	√	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian administrasi keuangan	100	persen		2.600.320.882					
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.563.376.433	√	√	√	√	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	500	dokumen	Penatausahaan keuangan	36.944.449	√	√	√	√	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen		433.760.725	√	√	√	√	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	588	unit	Penyediaan alat listrik	20.022.900					
		Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12	bulan	Penyediaan logistik kantor (ATK, ATK IT, Hari - Hari Besar Nasional, dan penyediaan sesajen sehari-hari)	187.154.525	√	√	√	√	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	150	buku	Penyediaan barang cetakan dan fasilitasi fotocopy	9.937.500	√	√	√	√	

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
			Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	14.220	lembar							
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1800	eks	Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	13.000.000	√	√	√	√	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	68	kali	Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	203.645.800	√	√	√	√	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen		146.678.000					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	12	unit	Penyediaan peralatan dan mesin	146.678.000	√	√	√	√	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen		456.504.160					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	1600	surat	Penatausahaan administrasi surat menyurat	49.496.836	√	√	√	√	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	11	rekening	Ketersediaan air, listrik, telepon dan internet	365.738.500	√	√	√	√	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	476	unit	Penyediaan bahan kebersihan	41.268.824	√	√	√	√	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen		1.419.257.344					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	11	unit	Pemeliharaan kendaraan dinas	233.848.060	√	√	√	√	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24	unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin	40.000.000	√	√	√	√	

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	unit	Pemeliharaan gedung kantor	1.145.409.284	√	√	√	√	
							6.140.616.423					

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,



Melani
Ketut Mertadina, S.STP., MAP
NIP. 19770510 199601 1 001

**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022**

Tujuan	Sasaran	Program				Kegiatan /Sub Kegiatan										
		Uraian	Indikator Program	Target Program	Realisasi	Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi	Anggaran	Realisasi					
1	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Sasaran 1 :Meningkatnya realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	5	persen	-34,33	persen	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	5	jenis		jenis	38.955.212	29.403.025
									Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	5	jenis		jenis	38.955.212	29.403.025
									Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	0	laporan		laporan	-	
									Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	2	kecamatan		kecamatan	5.645.100	4.079.000
									Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	25	buku		buku	5.645.100	4.079.000
2	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Sasaran 1 :Meningkatnya realisasi investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	50	persen	97,2	persen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	656	minat	3500	minat	99.150.235	93.346.828
									Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	1	kali	1	kali	99.150.235	93.346.828
3	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 2 :Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96	persen	100	persen	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96	persen	100	persen	449.200.505	430.571.275
									Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96	persen	100	persen	246.344.020	240.558.725

Tujuan	Sasaran	Program						Kegiatan /Sub Kegiatan								
		Uraian	Indikator Program	Target Program		Realisasi		Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi		Anggaran	Realisasi	
										Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96	persen	100	persen		
										Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96	persen	100	persen		
										Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96	persen	100	persen		
										Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	96	persen	100	persen	108.237.048	103.840.250
										Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96	persen	100	persen		
										Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2	pengaduan	2	pengaduan	26.157.162	20.785.550
										Banyaknya buku SKM yang dicetak	40	buku	40	buku		
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	16	kali	16	kali	68.462.275	65.386.750
4	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Sasaran 1 :Meningkatnya realisasi investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	5	persen	24,24	persen	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	50	pelaku usaha	161	pelaku usaha	426.899.599	344.861.900
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15	buku	15	buku	42.985.599	39.699.900

Tujuan	Sasaran	Program						Kegiatan /Sub Kegiatan								
		Uraian	Indikator Program	Target Program	Realisasi		Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi		Anggaran	Realisasi		
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	280	orang	280	orang	368.526.500	302.238.800
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	7	kali	5	kali	15.387.500	2.923.200
5	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 2 :Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	75	persen	80,95	persen	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	90	persen	100	persen	28.248.612	28.229.900
									Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perizinan dan non perizinan	250	orang	281	orang	28.248.612	28.229.900
6	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 2 :Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	persen	100	persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	persen	100	persen	35.996.049	35.905.250
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	6	buku	6	buku	34.090.749	34.062.375
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	20	buku	13	buku	926.000	870.700
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	20	buku	16	buku	786.700	779.950
									Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9	buku	9	buku	192.600	192.225
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	100	persen	100,00	persen	2.600.320.882	2.422.692.638
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	12	bulan	2.563.376.433	2.386.096.913,00

Tujuan	Sasaran	Program						Kegiatan /Sub Kegiatan								
		Uraian	Indikator Program	Target Program		Realisasi		Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi		Anggaran	Realisasi	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	500	dokumen	844	dokumen	36.944.449	36.595.725,00
									Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen	100,00	persen	433.760.725	331.730.065
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	588	unit	564	unit	20.022.900	19.430.100,00
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12	bulan	12	bulan	187.154.525	147.384.900,00
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	150	buku	108	buku	9.937.500	6.064.625,00
										Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	14.220	lembar	11.745	lembar		
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1800	eks	1.125	eks	13.000.000	7.875.000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	68	kali	52	kali	203.645.800	150.975.440
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	100	persen	146.678.000	144.530.000
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	12	unit	12	unit	146.678.000	144.530.000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	100,00	persen	456.504.160	355.792.546
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	1600	surat	3.001	surat	49.496.836	49.455.400,00
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	11	rekening	11	rekening	365.738.500	268.540.996,00

Tujuan	Sasaran	Program						Kegiatan /Sub Kegiatan							
		Uraian	Indikator Program	Target Program		Realisasi		Uraian	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi		Anggaran	Realisasi
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyaknya alat - alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	476	unit	472	unit	41.268.824	37.796.150,00
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	100,00	persen	1.419.257.344	1.078.826.119
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	11	unit	11	unit	233.848.060	187.421.000
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24	unit	38	unit	40.000.000	37535000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	unit	1	unit	1.145.409.284	853.870.119

**CAPAIAN RENCANA AKSI SASARAN
TAHUN 2022**

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Realisasi		Capaian		Penanggung Jawab	Capaian Aksi	
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran	Target	Anggaran	Target			
Sasaran 1 :Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	5	persen		44.600.312					33.482.025	-34,33	75,07	(686,60)	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6	jenis		38.955.212					29.403.025	5	75,48	83,33			
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	5	jenis		38.955.212	√	√	√	√	29.403.025	5	75,48	100,00			
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	0	kali	fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha	-		√		√		0					
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	8	kecamatan		5.645.100					4.079.000	2	72,26	25,00			
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	25	buku	Penyusunan profil investasi unggulan daerah	5.645.100			√	√	4.079.000	25	72,26	100,00			
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	50	persen		99.150.235					93.346.828	97,2	94,15	194,40		Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	656	minat		99.150.235					93.346.828	3.500	94,15	533,54			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	1	kali	Penyelenggaraan pameran investasi seperti APKASI	99.150.235		√			93.346.828	1	94,15	100,00			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	5	persen		426.899.599					344.861.900	24,24	80,78	484,80		Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	50	pelaku usaha		426.899.599		√			344.861.900	161	80,78	322,00			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	15	buku	Monitoring pelaku usaha untuk pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi	42.985.599	√	√	√	√	39.699.900	15	92,36	100,00			

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Realisasi		Capaian		Penanggung Jawab	Capaian Aksi
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran	Target	Anggaran	Target		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	280	orang	Memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan	368.526.500	√	√	√	√	302.238.800	280	82,01	100,00		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	7	kali	Memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya	15.387.500	√	√	√	√	2.923.200	5	19,00	71,43		16 pelaku usaha
Sasaran 2 :Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96	persen		449.200.505					430.571.275	100	95,85	104,17	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96	persen		449.200.505					430.571.275	100	95,85	104,17		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96	persen	Pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan permohonan	246.344.020	√	√	√	√	240.558.725	100	97,65	104,17		Pelaksanaan pelayanan ijin secara elektronik dan non elektronik Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM dari 3969 Permohonan di terbitkan 3969
			Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96	persen							100		104,17		Pelaksanaan pelayanan ijin secara elektronik non elektronik Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan dari 213 Permohonan di terbitkan 213	
			Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96	persen							100		104,17		Pelaksanaan pelayanan ijin secara elektronik non elektronik Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan dari 202 Permohonan di terbitkan 202	
			Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96	persen							100		104,17		Pelaksanaan pelayanan ijin secara elektronik Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika dari 1218 Permohonan di terbitkan 1218	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96	persen	Pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan permohonan	108.237.048	√	√	√	√	103.840.250	100	95,94	104,17		Pelaksanaan pelayanan ijin secara elektronik non elektronik Sektor PUPR dari 18 Permohonan di terbitkan 18

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Realisasi		Capaian		Penanggung Jawab	Capaian Aksi
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran	Target	Anggaran	Target		
			Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96	persen							100		1,04			Pelaksanaan pelayanan ijin secara elektronik non elektronik Sektor Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial dari 270 Permohonan di terbitkan 270
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya pengaduan yang ditangani	2	pengaduan	Penyediaan layanan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	26.157.162	√	√	√	√	20.785.550	2	79,46	100,00		Jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 2 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 2
			Banyaknya buku SKM yang dicetak	40	buku							40		100,00			
		Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	16	kali	Pelayanan perizinan dan non perizinan jemput bola	68.462.275	√	√	√		65.386.750	16	95,51	100,00		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	75	persen		28.248.612					28.229.900	80,95	99,93	107,93	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	90	persen		28.248.612					28.229.900	100	99,93	111,11		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	250	orang	Penyampaian informasi, penyajian dan pemanfaatan data	28.248.612	√	√	√	√	28.229.900	281	99,93	112,40		Banyaknya informasi yang ditindaklanjuti 281 orang
Sasaran 2 :Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	persen		5.092.517.160					4.369.476.618	100,00	85,80	100,00	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	persen		35.996.049					35.905.250	100,00	99,75	100,00		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	6	buku	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	34.090.749		√	√		34.062.375	6	99,92	100,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	20	buku	Penyusunan dokumen anggaran perangkat daerah	926.000					870.700	13	94,03	65,00		DPA yang telah dijilid dan di distribusikan 13 buku
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	20	buku	Penyusunan dokumen anggaran perubahan perangkat daerah	786.700			√	√	779.950	16	99,14	80,00		DPPA yang telah dijilid dan di distribusikan 16 buku
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9	buku	Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	192.600			√	√	192.225	9	99,81	100,00		Laporan kinerja perangkat daerah sebanyak 9 laporan

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Realisasi		Capaian		Penanggung Jawab	Capaian Aksi
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran	Target	Anggaran	Target		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian administrasi keuangan	100	persen		2.600.320.882					2.422.692.638	100,00	93,17	100,00		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.563.376.433	√	√	√	√	2.386.096.913,00	12	93,08	100,00		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 12 bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	500	dokumen	Penatausahaan keuangan	36.944.449	√	√	√	√	36.595.725,00	844	99,06	168,80		Verifikasi terhadap SPJ, SPP dan SPM sebanyak 844 dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen		433.760.725	√	√	√	√	331.730.065	100,00	76,48	100,00		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	588	unit	Penyediaan alat listrik	20.022.900					19.430.100,00	564	97,04	95,92		Penyediaan alat listrik sebanyak 564 unit
		Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12	bulan	Penyediaan logistik kantor (ATK, ATK IT, Hari - Hari Besar Nasional, dan penyediaan sesajen sehari-hari)	187.154.525	√	√	√	√	147.384.900,00	12	78,75	100,00		Penyediaan logistik sebanyak 12 bulan
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	150	buku	Penyediaan barang cetakan dan fasilitas fotocopy	9.937.500	√	√	√	√	6.064.625,00	108	61,03	72,00		Barang cetakan yang tersedia sebanyak 108 buku
			Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	14.220	lembar							11.745			82,59		Dokumen yang telah digandakan sebanyak 11.745
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1800	eks	Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	13.000.000	√	√	√	√	7.875.000	1.125	60,58	62,50		Penyediaan bahan bacaan sebanyak 1.125 eks
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	68	kali	Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	203.645.800	√	√	√	√	150.975.440	52	74,14	76,47		Penyediaan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi 25 kali, perjalanan dinas 30 OK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen		146.678.000					144.530.000	100	98,54	100,00		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	12	unit	Penyediaan peralatan dan mesin	146.678.000	√	√	√	√	144.530.000	12	98,54	100,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen		456.504.160					355.792.546	100,00	77,94	100,00		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	1600	surat	Penatausahaan administrasi surat menyurat	49.496.836	√	√	√	√	49.455.400,00	3.001	99,92	187,56		Penatausahaan surat menyurat sebanyak 3001 surat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	11	rekening	Ketersediaan air, listrik, telepon dan internet	365.738.500	√	√	√	√	268.540.996,00	11	73,42	100,00		Terbayarnya air, listrik telepon dan internet sebanyak 11 rekening
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	476	unit	Penyediaan bahan kebersihan	41.268.824	√	√	√	√	37.796.150,00	472	91,59	99,16		Penyediaan alat-alat kebersihan sebanyak 472 unit

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Sub Kegiatan				Realisasi		Capaian		Penanggung Jawab	Capaian Aksi
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran	Target	Anggaran	Target		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen		1.419.257.344					1.078.826.119	100,00	76,01	100,00		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	11	unit	Pemeliharaan kendaraan dinas	233.848.060	√	√	√	√	187.421.000	11	80,15	100,00		Pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 10 unit, 1 orang rusak berat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24	unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin	40.000.000	√	√	√	√	37535000	38	93,84	158,33		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	unit	Pemeliharaan gedung kantor	1.145.409.284	√	√	√	√	853.870.119	1	74,55	100,00		
							6.140.616.423					5.299.968.546			86,3100409		